

**PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI PAGARUYUNG
DALAM PENGELOLAAN TANAH ULAYAT**

SKRIPSI

Tugas Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas

Oleh :

ST. MUHAMMAD THARIQ
03 191 037



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

ABSTRAK

St. Muhammad Thariq, 03 191 037. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi : Peran KAN Nagari Pagaruyung Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat. Jumlah halaman 73 halaman. Pembimbing I Machdaliza Masri, SH, M. Si dan Pembimbing II Dr. Afrizal, MA.

Kerapatan Adat Nagari Pagaruyung merupakan sebuah struktur adat yang telah diformilkan oleh pemerintah. KAN di nagari Pagaruyung pada mulanya berasal dari struktur pemerintahan kerajaan Pagaruyung yang jauh lebih tua dari KAN yang ada sekarang. Datuk-datuk yang menjadi anggota KAN nagari Pagaruyung adalah datuk pucuk yang merupakan perangkat raja khusus dalam wilayah raja atau Pagaruyung. Namun KAN Nagari Pagaruyung menyimpan berbagai masalah yang telah meresahkan kehidupan sebagian masyarakat adat terutama dalam menyangkut persoalan tanah ulayat. Dari survey awal dalam pengelolaan tanah ulayat ternyata KAN tidak memainkan perannya dengan baik. Sepanjang tahun 2006 sampai 2009 dari 16 perkara yang diajukan masyarakat kepada KAN sebanyak 14 kasus tanah yang tidak selesai atau tidak diteruskan dan 2 kasus tanah yang diteruskan sampai ke pengadilan negeri Sebagaimana tertera dalam Perda No. 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yaitu KAN berfungsi untuk memelihara kelestarian adat dan menyelesaikan perselisihan *sako* dan *pusako*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana Peran KAN di Nagari Pagaruyung Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran yang terperinci dari suatu masalah sosial yang terjadi. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara mendalam dengan menggunakan *purposive sampling*. Analisa data menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang diperoleh di lapangan yang disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif. Dalam permasalahan ini peneliti melihat dari Teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Ritzer.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran KAN Nagari Pagaruyung dalam pengelolaan tanah ulayat tidak berjalan dengan baik karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor keanggotaan dalam KAN tidak sesuai dengan struktur adat yang telah ada di Pagaruyung, adanya kepentingan kelompok tertentu di dalam KAN dan intervensi pemerintah dalam menentukan hak penguasaan tanah. Semestinya KAN dapat bersama-sama dengan unsur adat lain yang ada untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebelum lahirnya Republik Indonesia pada umumnya masyarakat lokal sudah memiliki sistem pemerintahan sendiri untuk mengelola kehidupan sosialnya. Hampir semua wilayah di Nusantara memakai sistem kerajaan yang diwarisi turun temurun. Sebagian dari warisan tersebut masih terpelihara sampai sekarang yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk. Sebagian lagi habis atau hanya tinggal dalam bentuk cerita-cerita cerita yang dapat dijumpai dalam buku-buku pelajaran sejarah. Punahnya sistem ini juga disebabkan oleh ke-alergi-an sebagian besar masyarakat terhadap system feodalisme sebagai trauma masa lalu yang dianggap tidak relevan diterapkan zaman ini.

Kesultanan *Ngayogyakarta Hadiningrat* (Jogjakarta) di Jawa Tengah sebagai merupakan pecahan dari kerajaan kerajaan Majapahit sampai sekarang para pemangkunya masih berdaulat dan diakui oleh pemerintah Indonesia. Kerajaan Goa di Makassar, kesultanan Deli Serdang di Sumatera Utara, kerajaan Manggarai di Flores, kerajaan Siak di Riau, kerajaan Muko-Muko di Jambi juga demikian karena berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Hal yang sama juga dialami oleh kerajaan Pagaruyung di Minangkabau. Kerajaan Pagaruyung merupakan suatu fase tersendiri dalam sejarah Minangkabau. Kerajaan ini tidak terulang kembali (Manggis, 1982, 23).

Masyarakat Minangkabau memiliki sistem tersendiri dalam mengatur kehidupan sosialnya. Mulai dari unit terkecil disebut *taratak*, *dusun*, *kampung*, *nagari* kemudian dalam bentuk yang lebih luas disebut *luhak Tanah Data*, *luhak Agam*, *luhak Limopupuah Koto* sampai kepada sebuah kesatuan yang sangat luas yang disebut *alam Minangkabau*.

Sebelum adanya intervensi negara, baik Hindia Belanda, Jepang maupun Republik Indonesia, kelembagaan yang ada dimulai dari; *mamak* dan kerapatan kaum; *penghulu*, kerapatan suku; kerapatan adat nagari yang dipimpin oleh *tuo karapatan* dengan memakai sistem *musyawarah* dan *mufakat*. Karena peranan dan wewenang yang tidak jelas menyebabkan timbulnya kegelisahan, kebingungan dan ketidakpuasan masyarakat nagari, maka kelembagaan itu menjadi representative, komunikatif, responsive, aktif dan dinamis (Hasbi, 1989, 9).

Historiografi, etnografi dan adat Minangkabau selalu menekankan bahwa nagari adalah kesatuan sosial utama yang dominan yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Nagari merupakan kesatuan masyarakat adat yang otonom. Nagari merupakan republik mini dengan teritorial yang jelas, mempunyai tata pemerintahan sendiri dan mempunyai adat sendiri yang mengatur tata kehidupan anggotanya (Manan, 1995, 15). Walaupun dalam konteks wilayah teritorial Alam Minangkabau yang seluruhnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Pagaruyung

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Peran Kerapatan Adat (KAN) di nagari Pagaruyung dalam pengelolaan tanah ulayat dari hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa KAN dalam menjalankan kebijakannya tidak berjalan sesuai dengan diinginkan baik itu oleh KAN maupun dari masyarakat yang terlibat dalam masalah-masalah tanah ulayat yang ada di Pagaruyung.
2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kebijakannya tidak berjalan sesuai dengan aturan yang tercantum pada Perda No.2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Faktor-faktornya adalah anggota-anggota yang duduk di dalam KAN tidak berkompeten dalam menyelesaikan permasalahan tanah ulayat hal ini disebabkan pembentukan anggota KAN tidak bersesuaian dengan struktur adat yang ada di nagari Pagaruyung.
3. Adapun kebijakan KAN dalam pengelolaan tanah ulayat adalah untuk sekadar sebagai sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengetahui

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afrizal. 2005. *Metode Penelitian Sosiologi II*. Padang: Jurusan Sosiologi FISIP Unand.
- Afrizal, 2003. "*Konflik Akibat Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Perkebunan Inti Rakyat*". Padang: *Skripsi* Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas
- Amran, Rusli. 1986. *Padang Riwayatmu Dulu*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Amran, Rusli. 1981. *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Abdullah, Taufik. 1979. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Jogjakarta : Gajah Mada University Press.
- Amidhan, Drs. Saafroedin Bahar, Dr. 2006. *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta. KOMNAS HAM .
- Burgin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Drakard, Jane. 1999. *A Kingdom Of Words*. Kuala Lumpur : Fajar Bhakti
- Jamna, Jamaris. 2004. *Pendidikan Matrilineal*. Padang : Gunatama.
- Kahin, Audrey. 1999. *From Rebellion To Integration*. Amsterdam : Amsterdam University Press.
- Kaho, Josef R. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 1984. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kato, Tsuyoshi. 2005. *Adat Minangkabau dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Moleong, J Lexy. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Gramedia.